



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI KAMIS, 9 APRIL 2026



## RINGKASAN BERITA HARI INI



### Gelar Ngaji Cerdas, Berharap Konflik Global Tidak Berdampak ke Warga

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan Ngaji Cerdas Abad Pahing bersama KH Habib Amrullah yang diiringi dengan Halal Bihalal di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (7/4).



KEGIATAN tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo, Alimul Amrullah, yang mewakili Bupati Sidoarjo, Subandi, Turut hadir jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Sidoarjo serta ratusan peserta yang terdiri dari ketua

Diky Putra Damrah, Wawan Haidir Rizki

Ke Halaman 10

### Pintu Air Dam Krembung Hilang 4 Tahun, Irigasi Tiga Kecamatan Terganggu



TEGAS: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idraya saat tidak normalisasi sungai di Pintu Air Krembung.

KOTA-Fakta mengejutkan terungkap saat inspeksi mendadak yang dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idraya. Pintu Air Krembung di kawasan Krembung diketahui telah hilang selama empat tahun, sehingga fungsi pengaturan aliran air tidak berjalan optimal dan berdampak pada irigasi di tiga kecamatan. Teman tersebut didapat saat Wabup yang akrab disapa Mak Mimik meninjau langsung normalisasi sungai di Pintu Air Krembung, Dusun Biting, Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Rabu (8/4). Kondisi ini dinilai krusial karena berpengaruh terhadap kebu-

Ke Halaman 10



BERSERAKAN: Sampah di TPS Penatarsewu dikeluhkan masyarakat karena menutup jalan ke tambak.

### TPS Penatarsewu Semrawut, Bupati Minta Pembersihan Total

Sampah Berserakan Cemari Lingkungan



TPS ini harus ditata ulang agar persoalan tak muncul lagi," kata Subandi.

Subandi, Bupati Sidoarjo, mengatakan bahwa TPS ini harus ditata ulang agar persoalan tak muncul lagi. Kepala Desa Penatarsewu Choliq mengatakan pengelolaan sampah di wilayahnya masih permasalahannya. Ia berharap perhatian dari Pemkab. "Kami akan segera melakukan pembersihan agar pengelolaan sampah di TPS ini dapat lebih baik," kata Choliq.

### BURSA EKONOMI

#### BPS Sidoarjo Siapkan Sensus Ekonomi 2026

Sidoarjo, Bhirawa - Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo sedang mempersiapkan proses menuju Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini sebagai pendataan akan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala. Kepala BPS Sidoarjo, Bagyo Triaksono, mengatakan selama ini sektor industri menjadi salah satu penopang perekonomian utama di Kabupaten Sidoarjo. "Kita memperkuat koordinasi dengan Pemkab Sidoarjo, dan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, salah satunya untuk mendukung kelancaran pengumpulan dan pengolahan data dalam Sensus ekonomi ini," komentar Bagyo, Selasa (7/4) kemarin, di kantornya. BPS Sidoarjo lanjut Bagyo, juga sudah mengumpulkan asosiasi-asosiasi yang ada di kabupaten Sidoarjo dan melakukan komunikasi untuk kelancaran sensus ekonomi 2026 ini. Kolaborasi koordinasi dan diplomasi (KKD) semuanya dilakukan, kata Bagyo, dengan harapan akan bisa mendapatkan dukungan dari Pemkab Sidoarjo kepada petugas BPS Sidoarjo yang nanti akan melakukan pendataan di lapangan. Untuk keberhasilan program Nasional ini, lanjut Bagyo, para petugas pendata yang terlibat dalam pendataan sektor industri, akan dibekali kembali dengan metode dan pemahaman teknis guna memastikan proses pengumpulan data berjalan optimal. Data yang telah dikumpulkan para petugas BPS, kemudian diolah dan disajikan dalam rilis pertumbuhan ekonomi Sidoarjo secara triwulanan sepanjang tahun 2026. Dikatakan Bagyo, melalui pendataan berkala ini BPS Kabupaten Sidoarjo dapat memantau secara akurat dinamika kontribusi sektor industri serta perkembangan sektor-sektor lainnya, sebagai landasan menuju pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. [kus/mg]



Ruang pelayanan di Kantor BPS Sidoarjo. Syandita (mg)/Bhirawa



TRANSKRIPSI: Bupati Sidoarjo Subandi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025.

### Subandi: Hasil Audit BPK Jadi Motivasi Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

KOTA-Bupati Sidoarjo, Subandi, bersama Sekretaris Daerah, Fanny Andrianti, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (8/4). Penyerahan LKPD merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kepala daerah

diwajibkan menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk pemeriksaan oleh BPK. Bupati Subandi mengatakan hasil audit BPK akan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia optimis Sidoarjo dapat meraih nilai yang lebih baik dalam pemeriksaan BPK. "Jika tahun 2025 kita meraih WTP ke-12, maka tahun 2026 ini kami menargetkan WTP ke-15. Ini prestasi yang harus dipertahankan," ujarnya. Menanggapi laporan opini WTP yang dikeluarkan BPK, Subandi mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan dan akuntabilitas pengelolaan APBD. Ia mengemukakan komitmen untuk terus menjaga kualitas laporan keuangan serta mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan standar tinggi tersebut. Dibalik itu, Bupati Sidoarjo berharap opini WTP sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. "Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh ASN. Kami akan terus mendorong agar prestasi ini bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang," tandas Subandi. (dlv/ra)

### Banjir Kembali Rendam SMPN 2 Tanggulangin

Sekolah Pastikan TKA Tak Terganggu

SIDOARJO - Banjir kembali melanda kawasan Tanggulangin. Hingga kemarin (8/4), air masih menggenangi sejumlah kawasan permukiman dan SMPN 2 Tanggulangin. Meski begitu, keberadaan genangan tak sampai mengganggu proses pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Air tampak menggenangi halaman SMPN 2 Tanggulangin. Guru dan siswa terpaksa melanda di atas pembelajaran. Hingga kemarin, genangan masih sekitar 20 sentimeter. Kepala SMPN 2 Tanggulangin Supriyanto mengatakan, hujan deras sejak Selasa (7/4) sore kembali memperparah kondisi lapangan sekolah. Menurut dia, genangan terjadi akibat aliran air yang tidak lancar. "Air di gorong-gorong tak lancar," ungkapnya.



DAMPAK CUACA EKSTREM: Air setinggi 20 sentimeter masih menggenangi halaman SMPN 2 Tanggulangin hingga kemarin (8/4).

### Genangan di Perumahan Kana Saluran Tersumbat

HUJAN deras yang mengguyur sejak Selasa (7/4) sore juga menyebabkan Perumahan Puri Kallengah tergenang. Air masuk ke kawasan permukiman sejak dini hari dan belum sepenuhnya surut hingga kemarin (8/4) pagi. Genangan tampak merata di akses jalan lingkungan. Kondisi tersebut mengganggu kegiatan warga. Terutama saat berangkat

kerja dan mengantarkan anak sekolah. Camat Tanggulangin Arie Prabowo membenarkan adanya genangan di wilayah Puri Kallengah akibat hujan dengan intensitas tinggi. Dia masih berkoordinasi dengan DPUBMSDA untuk melakukan penanganan. "Kami sudah menerima laporan dan langsung koordinasi dengan instansi teknis untuk penanganan lebih lanjut," ujarnya. Arie menjelaskan, salah satu faktor penyebab genangan adalah kapasitas saluran yang tidak sebanding dengan debit air saat hujan deras. Selain itu, beberapa titik drainase juga membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan. "Kami akan usulkan normalisasi saluran agar aliran air bisa lebih lancar," kata Arie. (ful/hen)

**BANJIR TERJADI DI DUA DESA**  
Air juga menggenangi dua desa lainnya, yaitu Desa...  
**Ketanggungan mencapai 20 sentimeter**  
Banjir disebabkan kondisi saluran yang tersumbat



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Home / News / Regional Jatim / SOLUSI 'KEGADUAN' KONI SIDOARJO: Abah Warih Minta Imam Mukri Resmi Mundur, Silakan Gelar Muslub

Regional Jatim

## SOLUSI 'KEGADUAN' KONI SIDOARJO: Abah Warih Minta Imam Mukri Resmi Mundur, Silakan Gelar Muslub

Sejak Januari 2026, Ketua KONI Imam Mukri berhalangan tetap karena sakit. Pelaksana harian dipegang Imam Purwanto justru melahirkan kegaduan internal, termasuk memicu kekecewaan pengurus cabor.

Apr 8, 2026 - 16:35



NUSADAILY – SIDOARJO: Demi kondusifitas, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Warih Andono SH meminta Ketua KONI Sidoarjo Imam Mukri Afandi secara resmi meletakkan jabatannya. Selanjutnya digelar musyawarah luar biasa (Musbub) melibatkan seluruh cabor untuk menyusun kepemimpinan baru KONI Sidoarjo.

"Saya kira itu jalan terbaik bagi KONI karena sejauh ini roda organisasi tidak bisa berjalan dengan baik karena Pak Imam Mukri sakit dan berhalangan tetap. Sebaiknya dia secara resmi mundur saja dari jabatannya," kata Abah Warih, sapaan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, di sela-sela pertemuan dengan pengurus cabor di aula Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, Rabu (8/4/2026) siang tadi.

Lebih lanjut, politikus senior Partai Golkar ini menambahkan dari penjelasan para cabor menunjukkan roda organisasi KONI baik menyangkut koordinasi internal maupun dengan pengurus cabor sudah tidak berjalan efektif. Penyebabnya Imam Mukri yang hampir setahun menjabat ketua KONI ini sudah tidak bisa lagi menjalankan tugasnya dengan baik karena sakit.

Bahkan terhitung sejak Januari 2026, sudah tidak aktif lagi. Sebagai penggantinya, dia menunjuk Imam Purwanto yang jabatannya sebagai wakil ketua KONI menjadi pelaksana harian. Ironisnya itu justru membuah kegaduan internal, termasuk para pengurus cabor yang menyatakan kekecewaan atas keputusan Imam Mukri tersebut.

"Jadi demi kondusifitas, Pak Imam Mukri harus legowo dan secara resmi mundur. Kalau tidak, ya pengurus Cabor-cabor bisa bergerak untuk meminta segera ada musyawarah luar biasa," tegas Abah Warih yang datang ke acara dialogi bersama H. Tarkit Erdianto, anggota DPRD dari fraksi PDIP.

Dalam dialog itu, beberapa pengurus cabor menyampaikan sebenarnya Imam Mukri sudah mengundurkan diri dari jabatan ketua per Maret 2026. Sayangnya, pengunduran diri dengan alasan sakit itu tidak diikuti dengan surat resmi, sehingga langkahnya yang ambigu ini justru membuat kegaduan, sekaligus mengganggu jalannya roda organisasi.

Apalagi, belum ada langkah untuk mekanisme penggantian ketua KONI Sidoarjo, sudah ada indikasi penggunaan label pelaksana harian Ketua KONI Sidoarjo yang diisi Wakil Ketua Imam Purwanto. Bahkan dia sudah berani membuat surat undangan rapat kepada cabor-cabor untuk berkonsolidasi. "Padahal AD/ART tidak mengatur penunjukan ketua harian KONI," ujar Ida, Ketua Persatuan Senam Indonesia (Persani) Kabupaten Sidoarjo.

Senada dikatkan Hadi Salim, pembina Cabor Anggar maupun Suyud Supriaji MM, Sekretaris Forum komunikasi Cabor Sidoarjo ( Forkom Cabor Sidoarjo ). Pihaknya meminta ada ketegasan dari Imam Mukri, untuk segera mundur dari jabatannya karena berhalangan tetap. "Ini penting dilakukan, agar perjalanan KONI kedepan semakin baik. Tidak hanya terkait dengan eksistensi KONI, juga demi kelangsungan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Sidoarjo," ujarnya. (\*cak ful)

#Koni Sidoarjo #DPRD Sidoarjo #dinas pemuda dan olahraga #wakil ketua dprd #warih andono #pengurus cabor





ANGGER BONDAN/JAWA POS

**BERSERAKAN:** Sampah di TPS Penatarsewu dikeluhkan masyarakat karena menutup jalan ke tambak.

# TPS Penatarsewu Semrawut, Bupati Minta Pembersihan Total

## Sampah Berserakan Cemari Lingkungan

**SIDOARJO** – Bupati Subandi melakukan sidak di tempat pembuangan sampah (TPS) Desa Penatarsewu, Tanggulangin, kemarin (8/4). Kunjungan itu dilakukan setelah sistem pengelolaan TPS mendapat sorotan dari masyarakat. Selain menyebabkan pencemaran, kondisi sampah juga tak tertata rapi.

Dari sidak, diketahui bahwa tidak ada proses pemilahan sampah di TPS. Seluruhnya dibakar. Kondisi tersebut menyebabkan udara di sekitarnya tercemar.

Selain itu, sampah di TPS



TPS ini harus ditata ulang agar persoalan tak muncul lagi.”

**Subandi**  
Bupati Sidoarjo

tersebut menumpuk hingga berserakan di akses jalan para petambak. Subandi memastikan akan melakukan pembersihan total di lokasi tersebut. Dia akan memanggil pengelola, BPD dan kepala desa untuk duduk bersama. “TPS ini harus ditata

ulang agar persoalan tak muncul lagi,” katanya.

## Biaya Retribusi Dibebankan Desa

Menurut Subandi, pembersihan diperkirakan membutuhkan sekitar 50 truk pengangkut sampah. Biaya retribusi pembuangan ke TPA akan dibebankan ke pemerintah desa. “Kalau desa komitmen, kami akan bertanggung jawab,” tambah Subandi.

Kepala Desa Penatarsewu Choliq mengakui pengelolaan sampah di wilayahnya masih perlu dibenahi. Dia bersyukur mendapatkan perhatian dari Pemkab. “Kami akan segera melakukan perbaikan agar pengelolaan sesuai aturan,” kata Choliq. **(ful/hen)**

# Jawa Pos

## Dinkes Temukan 1.036 Kasus TBC dalam Tiga Bulan

### Perbanyak Skrining

**SIDOARJO** - Jumlah kasus tuberkulosis (TBC) di Sidoarjo masih cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir. Tahun lalu, dinas kesehatan (Dinkes) menemukan ada 6.200 kasus. Jumlah tersebut berpotensi meningkat tahun ini.

Saat ini, temuan kasus TBC masih terjadi. Selama Januari-Maret, dinkes menemukan ada 1.036 kasus baru. Jumlahnya diprediksi masih bertambah.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sidoarjo Djoko Setijono mengatakan bahwa peningkatan tersebut dipengaruhi oleh skrining yang dilakukan secara langsung ke masyarakat. Salah satunya melalui penggunaan rontgen mobile. "Penemuan kasus saat ini semakin aktif karena didukung fasilitas rontgen mobile untuk skrining," katanya kemarin (8/4).

### Sosialisasi Melalui Puskesmas

Djoko menjelaskan bahwa estimasi atau target



Penemuan kasus saat ini semakin aktif karena didukung fasilitas *rontgen mobile* untuk skrining."

**Djoko Setijono**  
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sidoarjo

penemuan mencapai 6.200 kasus tahun ini. Capaian masih berpotensi berubah.

"Dengan skrining yang semakin luas, kasus yang sebelumnya tidak terdeteksi kini berhasil ditemukan," kata Djoko.

Ada beragam upaya dilakukan untuk mengendalikan TBC. Selain skrining, ada sosialisasi melalui puskesmas. Masyarakat juga diimbau untuk segera memeriksa kondisinya saat mulai batuk. (**ful/hen**)

# Banjir Kembali Rendam SMPN 2 Tanggulangin

Sekolah Pastikan TKA Tak Terganggu

**SIDOARJO** - Banjir kembali melanda kawasan Tanggulangin. Hingga kemarin (8/4), air masih menggenangi sejumlah kawasan permukiman dan SMPN 2 Tanggulangin. Meski begitu, keberadaan genangan tak sampai mengganggu proses pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Air tampak menggenangi halaman SMPN 2 Tanggulangin. Guru dan siswa terpaksa melakukan bersih-bersih di sela pembelajaran. Hingga kemarin, genangan masih sekitar 20 sentimeter.

Kepala SMPN 2 Tanggulangin Supriyanto mengatakan, hujan deras sejak Selasa (7/4) sore kembali memperparah kondisi lapangan sekolah. Menurut dia, genangan terjadi akibat aliran air yang tidak lancar. "Air di gorong-gorong tak lancar," ungkapnya.

Pihak sekolah sudah berkoordinasi ke sejumlah OPD di Pemkab Sidoarjo terkait genangan tersebut. Salah satu solusi yang disiapkan dengan membangun crossing saluran drainase langsung menuju Sungai Kedungbanteng. "Katanya nanti langsung ke sungai, bareng dengan peninggian jalan beton," paparnya.

## Masih Tahap Lelang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo M. Mahmud menyebut proyek tersebut masih dalam tahap persiapan lelang. "Masih proses untuk dinaikkan ke lelang. Memang tahun ini rencananya betonisasi dan pembuatan drainase," ujarnya.

Banjir di kawasan SMPN 2 Tanggulangin tak sekali terjadi. Genangan selalu muncul saat musim hujan. Namun, belum ada solusi konkret dari pemerintah. (eza/hen)



DAMPAK CUACA EKSTREM: Air setinggi 20 sentimeter masih menggenangi halaman SMPN 2 Tanggulangin hingga kemarin (8/4).

ANDRER BONDAN/JAWA POS

## Genangan di Perumahan karena Saluran Tersumbat

**HUJAN** deras yang mengguyur sejak Selasa (7/4) sore juga menyebabkan Perumahan Puri Kalitengah tergenang. Air masuk ke kawasan permukiman sejak dini hari dan belum sepenuhnya surut hingga kemarin (8/4) pagi.

Genangan tampak merata di akses jalan lingkungan. Kondisi tersebut mengganggu kegiatan warga. Terutama saat berangkat

kerja dan mengantarkan anak sekolah.

Camat Tanggulangin Arie Prabowo membenarkan adanya genangan di wilayah Puri Kalitengah akibat hujan dengan intensitas tinggi. Dia masih berkoordinasi dengan DPUBMSDA untuk melakukan penanganan. "Kami sudah menerima laporan dan langsung koordinasi dengan instansi teknis untuk penanganan

lebih lanjut," ujarnya.

Arie menjelaskan, salah satu faktor penyebab genangan adalah kapasitas saluran yang tidak sebanding dengan debit air saat hujan deras. Selain itu, beberapa titik drainase juga membutuhkan perbaikan dan pembersihan. "Kami akan upayakan normalisasi saluran agar aliran air bisa lebih lancar," kata Arie. (ful/hen)



GANGGU AKTIVITAS WARGA: Drainase yang bermasalah menyebabkan banjir di Perumahan Puri Kalitengah.

ANDRER BONDAN/JAWA POS

## BANJIR TERJADI DI DUA DESA

Air juga menggenangi dua perumahan dan satu sekolah. Ketinggian air mencapai 20 sentimeter kemarin (8/4). Banjir disebabkan kondisi saluran yang bermasalah.



# Jawa Pos

## Pintu Air Dam Krembung Hilang 4 Tahun, Irigasi Tiga Kecamatan Terganggu



TEGAS: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat sidak normalisasi sungai di Pintu Air Krembung.

KOTA-Fakta mengejutkan terungkap saat inspeksi mendadak yang dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana. Pintu buka-tutup dam di kawasan Krembung diketahui telah hilang selama sekitar empat tahun, sehingga fungsi pengaturan aliran air tidak berjalan optimal dan berdampak pada irigasi di tiga kecamatan.

Temuan tersebut didapat saat Wabup yang akrab disapa Mak Mimik meninjau langsung normalisasi sungai di Pintu Air Krembung, Dusun Biting, Desa Mojo-runtut, Kecamatan Krembung, Rabu (8/4).

Kondisi ini dinilai krusial karena berpengaruh terhadap kebu-

tuhan air pertanian sekaligus meningkatkan potensi banjir di wilayah Krembung, Jabon, hingga Prambon. "Dari hasil pengecekan, ada kendala pada pintu buka-tutup yang ternyata sudah hilang sekitar empat tahun," ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan pintu air sangat vital dalam mengatur debit air. Tanpa sistem buka-tutup yang berfungsi, aliran air tidak dapat dikendalikan secara maksimal. Dampaknya, distribusi air ke area pertanian menjadi terganggu.

"Ini sangat penting karena menyangkut irigasi pertanian dari Krembung sampai Jabon.

● Ke Halaman 10



### Pintu Air Dam...

Kalau pintu air tidak bisa difungsikan, tentu berdampak luas," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Sidoarjo akan segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang memiliki kewenangan atas infrastruktur tersebut. Mimik menargetkan perbaikan bisa direalisasikan pada tahun ini.

"Segera kami komunikasikan dengan provinsi karena ini ranah BBWS. Harap-

annya, tahun 2026 sudah bisa dialokasikan anggaran agar fungsi pintu air kembali normal," jelasnya.

Ia menambahkan, setidaknya tiga kecamatan terdampak langsung akibat kondisi tersebut, yakni Krembung, Jabon, dan Prambon.

Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo melalui Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) terus mengencangkan normalisasi sungai di sejumlah titik. Kegiatan dilakukan oleh Satgas

Alat Berat di antaranya di Porong Kanal Desa Kedungangkring (Jabon), Anak Afvour Sidokare Desa Mojo Urang-gung, Magetan Kanal Desa Tambakce-mandi (Sedati), serta saluran Semam-

bung Pasmar 2 (Gedangan).

Normalisasi meliputi pengerukan lumpur, pembersihan sampah, hingga pembersihan aliran air guna mence-gah banjir dan memastikan distribusi

air tetap lancar.

"Normalisasi sudah berjalan, tinggal penanganan sisa sampah yang akan ter-ratasi seiring lancarnya aliran air," pungkas Mimik Idayana. (dik/vga)

### Gelar Ngaji Cerdas...

TP PKK tingkat kecamatan, desa, hingga organisasi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ainun Amalia menyampaikan harapan agar dinami-

besar bagi Indonesia, terutama Sidoarjo, sehingga masyarakat tetap aman dan sejahtera," ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi, mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana meningkatkan

atan ini juga menjadi kesempatan

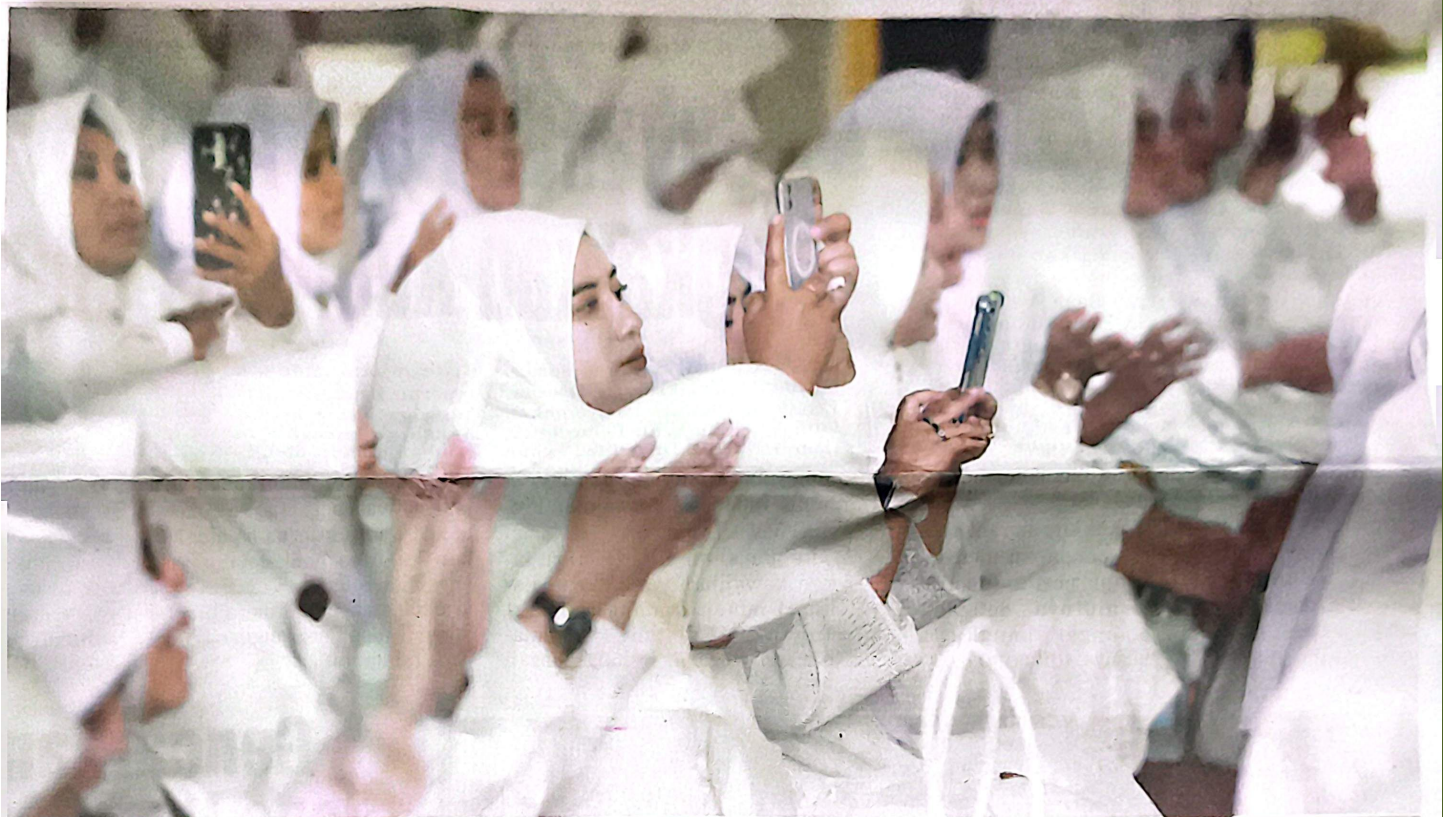
untuk saling memaafkan," ucapnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat persatuan masyarakat Sidoarjo semakin kuat. Dengan demikian, kondisi daerah





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



RAMBAH ILMU: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan Ngaji Cerdas.

## Gelar Ngaji Cerdas, Berharap Konflik Global Tidak Berdampak ke Warga

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan Ngaji Cerdas Ahad Pahing bersama KH Habib Amrullah yang dirangkai dengan Halal Bihalal di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (7/4).

Diky Putra Sansiri, Wartawan Radar Sidoarjo



KEGIATAN tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia, yang mewakili Bupati Sidoarjo, Subandi. Turut hadir jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Sidoarjo serta ratusan peserta yang terdiri dari ketua

● Ke Halaman 10



### Gelar Ngaji Cerdas,...

TP PKK tingkat kecamatan, desa, hingga organisasi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ainun Amalia menyampaikan harapan agar dinamika global yang diwarnai berbagai konflik tidak berdampak signifikan terhadap Indonesia, khususnya Kabupaten Sidoarjo.

"Kami memohon doa agar berbagai isu konflik di dunia tidak berdampak

besar bagi Indonesia, terutama Sidoarjo, sehingga masyarakat tetap aman dan sejahtera," ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Sariatun Subandi, mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana meningkatkan keimanan, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri.

"Selain untuk berdoa demi keamanan dan kesejahteraan bersama, kegi-

atan ini juga menjadi kesempatan untuk saling memaafkan," ucapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat persatuan masyarakat Sidoarjo semakin kuat. Dengan demikian, kondisi daerah yang aman, damai, dan sejahtera dapat terus terjaga.

"Dengan saling bermaaf-maafan, kita semua kembali fitri dan bersih," pungkasnya. (dik/vga)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



TRANSPARANSI: Bupati Sidoarjo Subandi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025.

## Subandi: Hasil Audit BPK Jadi Motivasi Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

KOTA-Bupati Sidoarjo, Subandi, bersama Sekretaris Daerah, Fenny Apridawati, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Penyerahan LKPD merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kepala daerah

diwajibkan menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk kemudian diaudit oleh BPK.

Bupati Subandi menegaskan, hasil audit BPK diharapkan menjadi motivasi bagi jajaran Pemkab Sidoarjo untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia optimistis Sidoarjo dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun ini.

“Jika tahun 2025 kita meraih WTP ke-12, maka tahun 2026 ini kami menargetkan WTP ke-13. Ini prestasi yang harus dipertahankan,” ujarnya.

Menurutnya, capaian opini WTP menjadi indikator penting transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.

Ia menegaskan komitmen untuk terus menjaga kualitas laporan keuangan serta mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempertahankan

standar tinggi tersebut.

Diketahui, Pemkab Sidoarjo telah meraih opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut sejak 2013. Konsistensi tersebut menempatkan Sidoarjo sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengelolaan keuangan terbaik di Jawa Timur.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh ASN. Kami akan terus mendorong agar prestasi ini bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang,” tandas Subandi. (dik/vga)





**EVAKUASI:** Personel Satpol PP Sidoarjo bersama warga usai mengamankan ODGJ di Banjar Kemuning.

## Ancam Warga Pakai Sajak, ODGJ Diamankan Satpol PP

KOTA-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang meresahkan di Desa Banjar Kemuning, Kecamatan Sedati, Selasa (7/4) malam.

Laporan pengaduan masyarakat diterima melalui layanan darurat 112 sekitar pukul 19.00 WIB. Menindaklanjuti hal itu, tim dari Bidang Trantibumtranmas yang terdiri dari enam personel langsung menuju lokasi di Perumahan Green Mansion untuk melakukan penanganan.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang ODGJ bernama Krisna dalam kondisi meresahkan. Ia bahkan sempat mengancam warga dengan membawa senjata tajam berupa pisau dapur. Petugas kemudian melakukan pengamanan secara cepat dan terukur.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (Kasi Opsdal) Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto

Koesno, mengatakan penanganan berlangsung kondusif tanpa adanya perlawanan.

“Begitu menerima laporan, kami langsung merespons dengan mengerahkan personel ke lokasi. Alhamdulillah, proses pengamanan berjalan lancar, yang bersangkutan dapat diamankan tanpa perlawanan maupun gangguan berarti,” ujarnya, Rabu (8/4).

Selanjutnya, yang bersangkutan dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur.

Novianto juga mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menemukan kondisi serupa. Menurutnya, laporan yang cepat sangat membantu petugas dalam melakukan penanganan secara tepat dan aman.

Kegiatan ini merupakan bagian dari patroli cipta kondisi yang rutin dilakukan Satpol PP Sidoarjo guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sidoarjo. (sur/vga)

## BURSA EKONOMI

### BPS Sidoarjo Siapkan Sensus Ekonomi 2026

Sidoarjo, Bhirawa

Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo sedang mempersiapkan menuju proses menuju Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini sebagai pendataan akan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala. Kepala BPS Sidoarjo, Bagyo Trilaksono, mengatakan selama ini sektor industri menjadi salah satu penopang perekonomian utama di Kabupaten Sidoarjo.

“Kita memperkuat koordinasi dengan Pemkab Sidoarjo, dan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, salah satunya untuk mendukung kelancaran pengumpulan dan pengolahan data dalam Sensus ekonomi ini,” komentar Bagyo, Selasa (7/4) kemarin, di kantornya.

BPS Sidoarjo lanjut Bagyo, juga sudah mengumpulkan asosiasi-asosiasi yang ada di kabupaten Sidoarjo dan melakukan komunikasi untuk kelancaran sensus ekonomi 2026 ini. Kolaborasi koordinasi dan diplomasi (KKD) semuanya dilakukan, kata Bagyo, dengan harapan akan bisa mendapatkan dukungan dari Pemkab Sidoarjo kepada petugas BPS Sidoarjo yang nanti akan melakukan pendataan di lapangan.

Untuk keberhasilan program Nasional ini, lanjut Bagyo, para petugas pendata yang terlibat dalam pendataan sektor industri, akan dibekali kembali dengan metode dan pemahaman teknis guna memastikan proses pengumpulan data berjalan optimal. Data yang telah dikumpulkan para petugas BPS, kemudian diolah dan disajikan dalam rilis pertumbuhan ekonomi Sidoarjo secara triwulanan sepanjang tahun 2026.

Dikatakan Bagyo, melalui pendataan berkala ini BPS Kabupaten Sidoarjo dapat memantau secara akurat dinamika kontribusi sektor industri serta perkembangan sektor-sektor lainnya, sebagai landasan menuju pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.[kus.mg6]



Syadinda (mg6)/Bhirawa

Ruang pelayanan di Kantor BPS Sidoarjo.

# Investasi Rp 18,88 Triliun di Sidoarjo Belum Serap Tenaga Kerja Maksimal

Redaksi  
8 April 2026

KOMENTAR © 44



**S**idoarjo | bratapos.com — Derasnya arus investasi di Kabupaten Sidoarjo yang menembus Rp 18,88 triliun pada 2025 belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Di balik capaian tersebut, angka pengangguran masih tergolong tinggi.

Berdasarkan data, realisasi investasi Sidoarjo dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pada 2021 tercatat Rp 9,77 triliun, meningkat menjadi Rp 14,08 triliun pada 2022, kemudian sedikit menurun ke Rp 13,68 triliun di 2023. Selanjutnya kembali naik menjadi Rp 17,04 triliun pada 2024 dan mencapai Rp 18,88 triliun pada 2025, bahkan melampaui target hingga 155,84 persen.

**BACA JUGA :** [Pemkab Sidoarjo Perkuat Digitalisasi Transaksi, Targetkan Implementasi QRIS Tap](#)

Namun, peningkatan investasi tersebut belum diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 masih berada di angka 5,75 persen, meski turun dari 6,49 persen pada tahun sebelumnya. Pengangguran didominasi oleh lulusan SMA hingga sarjana.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Muchammad Rafi Wibisono, menilai kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pertumbuhan investasi dan kesiapan tenaga kerja.

“Investasi besar harus sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai angkanya tinggi, tapi pengangguran tetap tinggi,” tegasnya, Selasa (7/4).

Menurut Rafi, pemerintah daerah tidak bisa hanya berfokus pada capaian nilai investasi semata. Dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Ia mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Sinergi antarinstansi dinilai penting agar setiap investasi yang masuk mampu membuka lapangan kerja secara maksimal, khususnya bagi warga lokal.

POPULAR NOW

- 1** Menjelang Hari Bhayangkara ke-78, Doa Lintas Agama Digelar Polres Kebumen  
1 tahun yang lalu © 4798
- 2** Ribuan Warga Desak Bonie Laksmiana, Maju sebagai Calon Wali Kota Madiun 2024  
1 tahun yang lalu © 3628
- 3** Banyuwangi Jadi Tuan Rumah Rangkaian Pre-event "The 5th Geotourism Festival & International Conference 2024"  
1 tahun yang lalu © 2667
- 4** Bupati Rembang Kukuhkan 277 Kepala Desa Perpanjangan Jabatan 2 Tahun  
1 tahun yang lalu © 2594
- 5** Pangdam IV/Diponegoro





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

“Tidak cukup hanya menarik investor. Harus ada kolaborasi konkret dengan Dinas Tenaga Kerja agar kebutuhan industri selaras dengan kompetensi tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Selain itu, Rafi juga menyoroti pentingnya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Dalam aturan tersebut, perusahaan diwajibkan memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan komposisi 70 persen tenaga kerja asal Sidoarjo dan 30 persen dari luar daerah.

“Regulasinya sudah jelas, tinggal bagaimana pengawasannya diperketat. Jangan sampai investor masuk, industri tumbuh, tapi tenaga kerja lokal tidak terserap maksimal,” tambahnya.

Ia menilai lemahnya implementasi aturan menjadi salah satu penyebab ketimpangan tersebut. Tanpa pengawasan yang ketat dan sinkronisasi kebijakan yang kuat, pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan hanya menjadi angka statistik semata.

“Jangan sampai investasi hanya dinikmati pelaku usaha, sementara masyarakat lokal belum merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

---

Tags: **Investasi Rp 18, 88 Triliun di Sidoarjo Belum Serap Tenaga Kerja Maksimal,**

Share:    



## Pemkab Sidoarjo Normalisasi Sungai Porong Kanal.

 Berita Utama, Daerah, Nasional, TNI POLRI | 
  Rabu, 8 April 2026 | 
  Parman Centralberita | 
  Leave a comment



Sidoarjo, centralberitanews.com – Pemkab Sidoarjo tengah mengerjakan normalisasi Sungai Porong Kanal. Satu alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimentasi sungai sepanjang 31 km itu. Pagi tadi, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana memantau pelaksanaan kegiatan normalisasi tersebut, Rabu, (8/4). Saat ini kegiatan normalisasi Sungai Porong Kanal telah mencapai wilayah Krembung.



Tepatnya di Pintu Air Krembung.

Wabup Hj. Mimik Idayana menyampaikan normalisasi Sungai Porong Kanal akan dilakukan sampai wilayah Kecamatan Prambon. Saat ini masih berlangsung di wilayah Kecamatan Krembung. Excavator Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo terus bekerja mengeruk sampah serta endapan lumpur. “Disini sudah selesai tapi masih ada sedikit sampah yang harus dibersihkan,” ucapnya.

Dikatakannya keberadaan Sungai Porong Kanal sangat penting bagi pertanian. Terdapat tiga kecamatan yang membutuhkan aliran air dari sungai tersebut. Mulai dari Kecamatan Krembung, Porong sampai Jabon. Oleh karenanya normalisasi sungai tersebut menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo.

“Tiga kecamatan sangat membutuhkan aliran air sungai ini,” ujarnya.

Dalam Sidaknya Wabup Hj. Mimik Idayana mendapati ulir pengatur pintu air Krembung yang rusak. Dua ulir dari 4 ulir pengatur pintu air tersebut hilang. Kondisi tersebut sudah terjadi empat tahun lalu. Oleh karenanya ia akan segera mengkoordinasikannya dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Peralnya kewenangan pintu air Krembung berada di bawah pengelolaan BBWS karena termasuk bagian dari jaringan irigasi Delta Brantas.

**Baca juga : [Pembukaan Kejuaraan Tarung Derajat POMPROV III Jawa Timur Tahun 2025](#)**

“Pintu air ini sangat penting karena menyangkut pertanian di wilayah Krembung sampai Jabon, kalau aliran air terkendala karena pintu airnya macet tidak bisa dibuka tutup, pertanian di tiga kecamatan akan terpengaruh,” ucapnya.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

TNI POLRI Politik Hukum Nasional Daerah Budaya Sosialita Wirausaha Opini



"Mulai kemarin kita mengerjakan normalisasi Sungai Porong Kanal dari Kedungsolo Porong sampai hari ini di wilayah Krembung, panjangnya sudah mencapai 7 km," ucapnya.

Prayit mengungkapkan pengerjaan normalisasi akan di lakukan sampai hulu Sungai Porong Kanal di wilayah Prambon. Ia memperkirakan satu bulan ini pengerjaannya akan selesai. Pengerjaan normalisasi Sungai Porong Kanal tersebut menjadi program rutin yang dilakukan dinasnya.

Rencananya ada 9 km yang akan dikerjakan secara swakelola oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo. "Ini pekerjaan rutin, swakelola yang akan dikerjakan Satgas Air Dinas PU Bina Marga Sidoarjo," ujarnya.

**Baca juga : [Pemkab Sidoarjo Tingkatkan Kapasitas Penyandang Disabilitas Mengelola Usaha](#)**

Ia juga mengatakan pengerjaan normalisasi Sungai Porong Kanal juga akan dilakukan pihak swasta. Saat ini masih dalam proses lelang pengerjaannya. Normalisasi akan dilakukan mulai wilayah Porong sampai Jabon. Panjangnya sekitar 2,5 km.

Normalisasi tersebut akan memperlancar aliran air Sungai Porong Kanal bagi 1,5 hektar lahan persawahan di Kecamatan Jabon. Pasalnya ia melihat kondisinya saat ini aliran Sungai Porong Kanal tidak sampai kebawah. Terutama saat kondisi musim kemarau. "Mulai dari jembatan arteri kebawah sampai dengan Pejarakan, masih proses lelang," ucapnya. git.

(@.prm).

Advertisement



Pengad



# Bupati Subandi Bakal Telisik PAD Sidoarjo di Setiap Dinas, Ini Alasan Kuatnya

9 Apr 2026 06:49



Fathur Roziq  
Editor



Retribusi parkir kendaraan di pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Retribusi parkir di tepi jalan umum ditarget Rp 13,5 miliar pada 2026 ini. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

**KETIK, SIDOARJO** – Pemkab Sidoarjo terus berupaya mendongkrak pundi-pundi pendapatan daerah. Demi menutup pengurangan Rp 640-an miliar dana transfer dari pusat ke APBD Sidoarjo 2026, Bupati Subandi akan menelisik pos-pos pendapatan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Naik atau turun, harus jelas alasannya.

"Contohnya pasar. Kita akan tahu di setiap pasar retribusinya seperti apa. Jumlah stannya berapa. Target pendapatan berapa," kata Bupati Subandi di sela-sela melakukan inspeksi mendadak ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah di Desa Terungkulon, Kecamatan Krian, pada Rabu (8 April 2026).

Target pendapatan retribusi dari pasar semula Rp 18 miliar turun menjadi Rp 12 miliar dengan alasan kondisi ekonomi, tidak bisa dilakukan begitu saja. Pengurangan target harus didasari oleh kajian yang jelas.

Contoh lain di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP). Berapa jumlah izin pendirian dan pajak reklame yang dilaporkan. Berapa yang tidak dilaporkan. Semua akan dipantau secara periodik.

Pemantauan pos-pos pendapatan asli daerah itu bisa dilakukan bila setiap OPD membuka *dashboard*. Setiap hari, setiap 3 bulan, bupati akan bisa memantau. Berapa detail pendapatan, bupati harus tahu. Pajak hotel, restoran, dan sebagainya.

## Baca Juga:

[Sempadan Sungai Diserobot Perumahan, Bupati Subandi Perintahkan Panggil Pengembang](#)

Informasi yang diperoleh *Ketik.com* menyebutkan, PAD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 1,921 triliun pada 2021; Rp 1,801 triliun pada 2022; Rp 2,050 triliun pada 2023; Rp 2,353 triliun pada 2024; dan Rp 2,721 triliun pada 2025. Sumber PAD Sidoarjo adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain sumber PAD yang sah.

Adapun realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan mencapai Rp 4.669 triliun pada 2021, Rp 4.504 triliun pada 2022; Rp 5.020 triliun pada 2023, Rp 5.333 triliun 2024, dan Rp 5.448 trilun pada 2025.

Bupati Subandi menyatakan peningkatan pendapatan daerah akan terus ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan berbagai sektor di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini, lanjut dia, ada jalan rusak, masyarakat protes. Jalan-jalan rusak diviralkan. Tugas dinas-dinas adalah meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Subandi menyatakan peningkatan pendapatan daerah akan terus ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan berbagai sektor di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini, lanjut dia, ada jalan rusak, masyarakat protes. Jalan-jalan rusak diviralkan. Tugas dinas-dinas adalah meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan.

"Dengan PAD yang tinggi, masyarakat akan bisa merasakan hasil pembangunan," tegas Bupati Subandi.

## Baca Juga:

**Bau Busuk Sampah Ganggu Ribuan Santri Ponpes Al Amanah Sidoarjo, Bupati Subandi: Besok Semua Harus Bersih**

Di sisi lain, untuk masyarakat yang berpenghasilan kecil, pajak mereka diringankan. Misalnya, pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk lahan pertanian. Nilainya diturunkan. Sebaliknya, yang dinaikkan adalah PBB kawasan perumahan baru.



"Kita sudah membuat peraturan bupati (perbup). PBB untuk lahan pertanian diturunkan," tambah Bupati Subandi. (\*)

Yuk, baca berita ketik  
lainnya di Google News!  
Temukan Lowongan Kerja Teraktual



Kunjungi

## Tags:

Bupati Suband

PAD Sidoarjo

Pendapatan Daerah Sidoarjo

Retribusi Parkir Sidoarjo

Pajak Sidoarjo



# Tolak Penunjukan Ketua Harian KONI, Forkom Cabor Minta Imam Mukri Mundur Secara Legowo

Admin — 08/04/2026

Share

Read Time: 1 Minute, 25 Second



SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Hampir satu tahun menjabat sebagai ketua KONI Sidoarjo, Imam Mukri Afandi dikabarkan memilih mengundurkan diri dari posisi ketua per Maret 2026, meskipun belum ada surat resmi.



Dari informasi yang berhasil dihimpun, pengunduran diri Imam Mukri sebagai ketua KONI Sidoarjo ini, disampaikan kepada sebagian pengurus dan Cabor, dengan alasan sakit.

Dan akibat dari pengunduran diri Imam Mukri yang setengah – setengah ini, malah membuat KONI Sidoarjo kacau.

Pasalnya, belum ada langkah untuk mekanisme penggantian ketua KONI Sidoarjo, sudah ada indikasi penggunaan label pelaksana harian Ketua KONI Sidoarjo yang diisi oleh wakil ketua 1 Imam purwanto.

Malah, Imam Purwanto sudah berani membuat surat undangan konsolidasi ke Cabor Cabor dengan label sebagai pelaksana ketua harian KONI Sidoarjo.

"Padahal tidak ada di AD ART itu penunjukan ketua harian KONI," ujar Ida ketua persatuan senam Indonesia (Persani) Kabupaten Sidoarjo yang diamini Hadi Salim pembina Cabor Anggar saat acara diskusi Cabor bersama wakil rakyat, Rabu (8/4/2026).

Senada dengan Ida dan Hadi, Suyud Supriaji MM

Sekretaris Forum komunikasi Cabor Sidoarjo ( Forkom Cabor Sidoarjo ) juga meminta ada ketegasan dari Imam Mukri, untuk segera mundur dari ketua KONI jika memang sudah berhalangan tetap.

Ini penting dilakukan, agar perjalanan KONI kedepan semakin baik.

Sementara itu H.Warih Andono SH Wakil ketua DPRD Sidoarjo yang hadir bersama H.Tarkit Erdianto dalam diskusi bersama para ketua Cabor, secara terbuka dan tegas, juga meminta Imam Mukri untuk meletakkan jabatan sebagai ketua KONI Sidoarjo secara legowo.

Pasalnya, roda organisasi KONI Sidoarjo sejak Januari 2026 sudah tidak bisa berjalan karena Imam Mukri sudah tidak aktif lagi karena alasan kesehatan.

"Saya sarankan Pak Imam Mukri Mundur saja. Kalau tidak mau mundur, ya Cabor Cabor yang bergerak untuk meminta segera ada Musyawarah luar biasa," terang Warih Andono. (Abidin)



About Post Author

admin

admin@liputansidoarjo.com

<https://liputansidoarjo.com>

## Pemkab Sidoarjo Normalisasi Sungai Porong Kanal

April 8, 2026 - 55 Views



Progresjatim.com, Sidoarjo- Pemkab Sidoarjo tengah mengerjakan normalisasi Sungai Porong Kanal. Satu alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimentasi sungai sepanjang 31 km itu. Pagi tadi, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana memantau pelaksanaan kegiatan normalisasi tersebut, Rabu, (8/4). Saat ini kegiatan normalisasi Sungai Porong Kanal telah mencapai wilayah Krembung. Tepatnya di Pintu Air Krembung.

Wabup Hj. Mimik Idayana menyampaikan normalisasi Sungai Porong Kanal akan dilakukan sampai wilayah Kecamatan Prambon. Saat ini masih berlangsung di wilayah Kecamatan Krembung. Excavator Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo terus bekerja mengeruk sampah serta endapan lumpur.

"Disini sudah selesai tapi masih ada sedikit sampah yang harus dibersihkan," ucapnya. Dikatakannya keberadaan Sungai Porong Kanal sangat penting bagi pertanian. Terdapat tiga kecamatan yang membutuhkan aliran air dari sungai tersebut. Mulai dari Kecamatan Krembung, Porong sampai Jabon. Oleh karenanya normalisasi sungai tersebut menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo.

"Tiga kecamatan sangat membutuhkan aliran air sungai ini," ujarnya. Dalam Sidaknya Wabup Hj. Mimik Idayana mendapati ulir pengatur pintu air Krembung yang rusak. Dua ulir dari 4 ulir pengatur pintu air tersebut hilang. Kondisi tersebut sudah terjadi empat tahun lalu. Oleh karenanya ia akan segera mengkoordinasikannya dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Palsalnya



Progresjatim.com, Sidoarjo- Pemkab Sidoarjo tengah mengerjakan normalisasi Sungai Porong Kanal. Satu alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimentasi sungai sepanjang 31 km itu. Pagi tadi, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana memantau pelaksanaan kegiatan normalisasi tersebut, Rabu, (8/4). Saat ini kegiatan normalisasi Sungai Porong Kanal telah mencapai wilayah Krembung. Tepatnya di Pintu Air Krembung.

Wabup Hj. Mimik Idayana menyampaikan normalisasi Sungai Porong Kanal akan dilakukan sampai wilayah Kecamatan Prambon. Saat ini masih berlangsung di wilayah Kecamatan Krembung. Excavator Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo terus bekerja mengeruk sampah serta endapan lumpur.

“Disini sudah selesai tapi masih ada sedikit sampah yang harus dibersihkan,” ucapnya. Dikatakannya keberadaan Sungai Porong Kanal sangat penting bagi pertanian. Terdapat tiga kecamatan yang membutuhkan aliran air dari sungai tersebut. Mulai dari Kecamatan Krembung, Porong sampai Jabon. Oleh karenanya normalisasi sungai tersebut menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo.

“Tiga kecamatan sangat membutuhkan aliran air sungai ini,” ujarnya.

Dalam Sidaknya Wabup Hj. Mimik Idayana mendapati ulir pengatur pintu air Krembung yang rusak. Dua ulir dari 4 ulir pengatur pintu air tersebut hilang. Kondisi tersebut sudah terjadi empat tahun lalu. Oleh karenanya ia akan segera mengkoordinasikannya dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Pasalnya kewenangan pintu air Krembung berada di bawah pengelolaan BBWS karena termasuk bagian dari jaringan irigasi Delta Brantas.

“Pintu air ini sangat penting karena menyangkut pertanian di wilayah Krembung sampai Jabon, kalau aliran air terkendala karena pintu airnya macet tidak bisa dibuka tutup, pertanian di tiga kecamatan akan terpengaruh,” ucapnya.

Sementara itu Kabid Pengairan Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Prayit mengungkapkan pengerjaan normalisasi Sungai Porong Kanal dimulai dari hilir sampai hulu. Saat ini sudah 7 km pengerjaan normalisasi Sungai Porong Kanal telah dilakukan. Normalisasi dimulai dari wilayah Porong sampai Prambon. Titik-titik sungai yang mengalami sedimentasi serta plengsengan sungai yang mengalami longsor akan dikeruk

Mulai kemarin kita mengerjakan normalisasi Sungai Porong Kanal dari Kedungsolo Porong sampai hari ini di wilayah Krembung, panjangnya sudah mencapai 7 km,” ucapnya.

Prayit mengungkapkan pengerjaan normalisasi akan dilakukan sampai hulu Sungai Porong Kanal di wilayah Prambon. Ia memperkirakan satu bulan ini pengerjaannya akan selesai. Pengerjaan normalisasi Sungai Porong Kanal tersebut menjadi program rutin yang dilakukan dinasny. Rencananya ada 9 km yang akan dikerjakan secara swakelola oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo.

“Ini pekerjaan rutin, swakelola yang akan dikerjakan Satgas Air Dinas PU Bina Marga Sidoarjo,” ujarnya.

Ia juga mengatakan pengerjaan normalisasi Sungai Porong Kanal juga akan dilakukan pihak swasta. Saat ini masih dalam proses lelang pengerjaannya. Normalisasi akan dilakukan mulai wilayah Porong sampai Jabon. Panjangnya sekitar 2,5 km. Normalisasi tersebut akan memperlancar aliran air Sungai Porong Kanal bagi 1,5 hektar lahan persawahan di Kecamatan Jabon. Pasalnya ia melihat kondisinya saat ini aliran Sungai Porong Kanal tidak sampai ke bawah. Terutama saat kondisi musim kemarau.

“Mulai dari jembatan arteri ke bawah sampai dengan Pejarakan, masih proses lelang,” pungkasnya.(GUS)

Post Views: 55

## Bupati Subandi Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Pengelolaan Sampah di Sidoarjo

April 8, 2026 - 23 Views



Progresjatim.com, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, mendorong pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat melakukan sidak ke sejumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS), , Rabu (8/4/2026).

Beberapa TPS yang menjadi sasaran sidak kali ini antara lain TPS di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin serta TPS Desa Terung Kulon Kecamatan Krian.

Dalam peninjauan di TPS Desa Penatarsewu, H.Subandi menemukan bahwa pengelolaan sampah belum berjalan sesuai regulasi dan telah berlangsung tanpa penanganan maksimal sejak 2013. Ia menilai kondisi tersebut harus segera dibenahi melalui komitmen bersama seluruh pihak terkait.

“Kita melihat pengelolaan sampah di sini masih belum tertata dengan baik. Mudah mudahan setelah ini kita bisa menemukan solusi bersama,” ujar H.Subandi.

Selain itu, ia juga menyoroti ketidaksesuaian dalam penerapan retribusi sampah di



Progresjatim.com, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, mendorong pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat melakukan sidak ke sejumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS), Rabu (8/4/2026).

Beberapa TPS yang menjadi sasaran sidak kali ini antara lain TPS di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin serta TPS Desa Terung Kulon Kecamatan Krian.

Dalam peninjauan di TPS Desa Penatarsewu, H.Subandi menemukan bahwa pengelolaan sampah belum berjalan sesuai regulasi dan telah berlangsung tanpa penanganan maksimal sejak 2013. Ia menilai kondisi tersebut harus segera dibenahi melalui komitmen bersama seluruh pihak terkait.

“Kita melihat pengelolaan sampah di sini masih belum tertata dengan baik. Mudah mudahan setelah ini kita bisa menemukan solusi bersama,” ujar H.Subandi. Selain itu, ia juga menyoroti ketidaksesuaian dalam penerapan retribusi sampah di masyarakat yang tidak mengacu pada aturan yang berlaku. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola persampahan ke depan.

H.Subandi menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat. Ia memastikan akan mengumpulkan seluruh pihak untuk menyepakati langkah penanganan yang terintegrasi.

“Pengelolaan TPS ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab bersama. Setelah ada kesepakatan, kita lakukan pembenahan secara menyeluruh,” tegasnya di TPS Penatarsewu.

Dukungan anggaran serta perbaikan akses menuju lokasi TPS juga akan menjadi perhatian guna menunjang efektivitas operasional pengangkutan sampah. Lebih lanjut, H.Subandi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan terhadap seluruh TPS di wilayah Sidoarjo.

“Melalui pemetaan ini, kita ingin menyusun perencanaan yang matang, termasuk penganggaran setiap tahunnya, sehingga permasalahan sampah bisa diselesaikan secara bertahap,” jelasnya.

Dalam sidak terpisah di TPS Desa Terung Kulon, H.Subandi menyoroti kondisi TPS yang tidak berfungsi optimal dan hanya menjadi tempat pembuangan sampah. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, hingga risiko kebakaran, terutama saat musim kemarau.

“Kalau dibiarkan, ini bisa menimbulkan polusi udara, bau tidak sedap, dan mengganggu lingkungan sekitar, apalagi berada di kawasan padat penduduk dan dekat dengan aktivitas pendidikan,” ujarnya.

Dalam dialog dengan perangkat desa dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), diketahui bahwa pengelolaan TPS tersebut dalam kondisi vakum dan belum memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah (KSP). Menyikapi hal itu, H.Subandi langsung menginstruksikan pembentukan KSP sebagai langkah awal pembenahan.

“KSP harus segera dibentuk. Setelah itu, kita tata sistem pengelolaannya, mulai dari pengangkutan, pemilahan, hingga pengolahan sampah,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah desa untuk berkoordinasi dengan DLHK serta mencari lokasi alternatif di Tanah Kas Desa (TKD) yang lebih representatif untuk pembangunan TPS baru, agar tidak mengganggu permukiman warga.

Sebagai langkah awal, H.Subandi memerintahkan pembersihan (clean up) lokasi TPS segera dilakukan. Setelah KSP terbentuk, akan dilanjutkan dengan perencanaan menyeluruh terkait kebutuhan lahan, kapasitas pengolahan, hingga estimasi anggaran pembangunan.

Di samping itu, H.Subandi menyoroti masih adanya praktik pembuangan dan pembakaran sampah liar di tengah permukiman warga yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Pemerintah pun akan mengevaluasi kemungkinan relokasi TPS yang berada di kawasan permukiman serta memastikan pengelolaan sesuai standar lingkungan.

“Kalau ini dibiarkan, tentu akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Ini yang tidak boleh terjadi,” pungkasnya.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Bupati H.Subandi berharap tercipta sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, terintegrasi, dan berkelanjutan, guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat Sidoarjo. (GUS)

📌 Post Views: 23



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Cari Berita

HOME METROPOLIS POLITIK EKBIS HUKRIM PERISTIWA ADVERTORIAL PROFILE KULINER GAYA HIDUP PEMERINTAHAN PENDIDIKAN

Di Tengah 'Turbulensi', Sekjen DPP PKB Minta Sidoarjo Jadi Laboratorium Kemenangan Bagi Daerah Lain ■ Dugaan Intervensi 'Penguasa' Warnai Dukung - Me

## Serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK Tepat Waktu, Bupati Sidoarjo Berharap Standarisasi Laporan dan Targetkan WTP ke 13

Republikjatim.Com  
Rabu, 08 Apr 2026 11:09 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Penyerahan dokumen itu, dilakukan secara serentak seluruh pemerintah daerah se Jawa Timur di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang berlokasi di Jl Raya Ir H Juanda, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Senin (30/03/2026).



Kamis, 09 Apr 2026 00:09 WIB

**Diduga Terjatuh Saat Bermain Sendirian, Balita 2 Tahun Hilang Tenggelam di Sungai Kalidawir Tanggulangin**

Turut hadir dalam kegiatan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa serta Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin.

Penyerahan LKPD ini menjadi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Khususnya, pasal 56, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan itu, selanjutnya akan diaudit untuk menentukan opini atas kewajaran penyajian informasi keuangan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang memenuhi kewajiban penyampaian LKPD tepat waktu. Menurutnya, hal itu menunjukkan komitmen nyata dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah.

"Ketepatan waktu penyerahan LKPD ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Saya berharap seluruh daerah di Jatim dapat terus meningkatkan kualitas laporannya. Harapannya, agar tidak hanya tepat waktu, tetapi juga semakin berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan," pinta Khofifah Indar Parawansa di sela penyerahan.





Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Sementara Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin menjelaskan penyerahan LKPD Unaudited menjadi tahap awal dalam rangkaian proses audit. Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.

"Kami mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan laporan. Karena hal itu, mendukung kelancaran proses audit. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan," ungkapnya.

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo, Subandi menyampaikan harapannya agar hasil audit yang dilakukan BPK RI dapat menjadi motivasi bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

"Kami berkomitmen untuk mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir. Kalau di tahun 2025 Pemkab Sidoarjo meraih WTP ke 12, kami berharap di tahun 2026 ini bisa meraih WTP ke 13. Karena itu prestasi yang layak dipertahankan," ucap Subandi.



Rabu, 08 Apr 2026 20:30 WIB

**Kecewa Saat Sidak TPST Penatarsewu dan Terungkulon, Bupati Minta Benahi Seluruh Pengelolaan Sampah di Sidoarjo**

Menurut Subandi, keberhasilan meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian itu, akan menjadi indikator transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terus terjaga.

"Semoga hasil audit semakin mendorong peningkatan kinerja kami. Khususnya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kami ingin memastikan kualitas laporan keuangan tetap baik serta tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel dan berstandar tinggi," katanya.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Cari Berita

HOME METROPOLIS POLITIK EKDIS HUKUM PERISTIWA ADVERTORIAL PROFILE KULINER GAYA HIDUP PEMERINTAHAN PENDIDIKAN

ua yang 'Mengurus' Partai dan Rakyat Bukan 'Jadi Urusan' ■ Percepat dan Perluas Transaksi Digital, Pemkab Sidoarjo Segera Terapkan Pembayaran QRIS Taj

Menurut Subandi, keberhasilan meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian itu, akan menjadi indikator transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terus terjaga.

"Semoga hasil audit semakin mendorong peningkatan kinerja kami. Khususnya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kami ingin memastikan kualitas laporan keuangan tetap baik serta tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel dan berstandar tinggi," katanya.

Dengan penyerahan LKPD ini, Pemkab Sidoarjo menunjukkan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

"Hal itu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," papar mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini.

Diketahui sebelumnya, konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah membawa Kabupaten Sidoarjo kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Hal ini wujud pencapaian luar biasa karena menjadi ke 12 kali diterima Pemkab Sidoarjo secara berturut-turut sejak tahun 2013 lalu di bulan April 2025 kemarin.

"Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi kewajiban utama pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Alhamdulillah kita mampu mempertahankan capaian opini WTP ke 12 kali di tahun kemarin," ungkap Subandi yang juga mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati selama dua periode ini.



Rabu, 08 Apr 2026 19:03 WIB

**Sidak Pemeliharaan Jalan Suko - Sumberejo, Wabup Sidoarjo Menyoal Drainase Pemicu Banjir dan Jalan Rusak**

Subandi menilai capaian prestasi itu menunjukkan keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, hal ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBD saja. Akan tetapi juga menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah.

"Capaian Opini WTP ini penting dipertahankan, alasannya menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel," jelasnya.

Bupati Subandi juga menyampaikan keberhasilan mempertahankan WTP itu, tidak lepas dari kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Ia berkomitmen untuk terus mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempertahankan standar tinggi ini.

"Kami akan terus mendorong seluruh OPD untuk mempertahankan Opini WTP di tahun-tahun berikutnya," tandasnya optimistis.

Sementara pencapaian WTP ke-12 itu sekaligus menempatkan Sidoarjo sebagai salah satu dari dua daerah pertama yang menerima LHP LKPD 2024 dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, berkat ketepatan waktu dalam menyampaikan LKPD unaudited.

"Konsistensi Sidoarjo dalam mempertahankan opini WTP diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab," pungkask Abah Subandi. Adv/Ary/Waw

Editor : Redaksi



## Lobi Maut Wabup Mimik Idayana, Sidoarjo Diguyur Rp 36 Miliar untuk Bedah 1.200 RTLH

Republikjatim.Com  
Rabu, 08 Apr 2026 16:45 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Kabar gembira menyelimuti warga Sidoarjo. Ribuan hunian tak layak atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bakal segera berubah wajah. Semua ini, berkat gerilya lobi intensif yang dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana hingga pemerintah pusat resmi mengucurkan dana segar sebesar Rp 36 miliar.

Dana jumbo ini, dialokasikan khusus untuk merehabilitasi 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di berbagai titik wilayah desa dan kecamatan di Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2026.



Kamis, 09 Apr 2026 00:09 WIB

**Diduga Terjatuh Saat Bermain Sendirian, Balita 2 Tahun Hilang Tenggelam di Sungai Kalidawir Tanggulangin**

Keberhasilan ini, menjadi capaian luar biasa bagi Pemkab Sidoarjo. Awalnya, target perbaikan rumah hanya dipatok pada angka 164 unit melalui sinergi Pemkab dan Baznas. Namun, dengan tambahan suntikan dana dari pusat ini, total rumah yang akan dibedah melonjak drastis menjadi 1.364 unit. Bahkan, diprediksi mampu menembus angka 1.500 RTLH.

"Kami ingin memastikan masyarakat Sidoarjo tinggal di rumah yang layak, aman dan sehat. Ini bukan sekadar program saja, tetapi bentuk kehadiran nyata pemerintah untuk rakyatnya," ujar Mimik Idayana kepada republikjatim.com, Rabu (08/04/2026).





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Agar program ini berjalan transparan dan tanpa celah penyimpangan, Wabup Sidoarjo Mimik Idayana berkomitmen untuk mengawal langsung prosesnya di lapangan. Setiap rumah akan mendapatkan bantuan sekitar Rp 25 sampai Rp 30 juta.



Rabu, 08 Apr 2026 20:30 WIB

**Kecewa Saat Sidak TPST Penatarsewu dan Terungkulon, Bupati Minta Benahi Seluruh Pengelolaan Sampah di Sidoarjo**

"Dana itu, difokuskan pada perbaikan struktur bangunan agar memenuhi standar keamanan dan kesehatan hunian," ungkap mantan anggota DPRD Sidoarjo periode 2019 - 2024 ini.

Mimik Idayana memastikan tidak akan sekadar menerima laporan di balik meja. Mimik juga bakal memastikan setiap rupiah sampai ke tangan yang berhak menerimanya.

"Saya akan ikut mengawasi di lapangan. Dana ini, harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan serta dimanfaatkan sesuai peruntukannya," pintanya dengan nada tegas.



Rabu, 08 Apr 2026 19:03 WIB

**Sidak Pemeliharaan Jalan Suko - Sumberejo, Wabup Sidoarjo Menyoal Drainase Pemicu Banjir dan Jalan Rusak**

Sementara dengan percepatan realisasi yang ditargetkan mulai berjalan segera setelah pencairan anggaran pada Mei hingga Juni 2026 mendatang.

"Pemkab Sidoarjo optimis angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan dan kesejahteraan warga akan meningkat secara signifikan melalui program perbaikan RTLH ini," pungkasnya.  
Ary/Waw

**Editor : Redaksi**



## Sidak Pemeliharaan Jalan Suko - Sumberejo, Wabup Sidoarjo Menyoal Drainase Pemicu Banjir dan Jalan Rusak

Republikjatim.Com  
Rabu, 08 Apr 2026 19:03 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana melakukan sidak pekerjaan pemeliharaan jalan di ruas Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo - Desa Sumberejo, Kecamatan Wonoayu, Rabu (08/04/2026). Dalam sidak itu, Mimik Idayana menyoroti kualitas pekerjaan jalan sekaligus kondisi drainase yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah itu.

Dalam dialog langsung dengan Satgas Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Pemkab Sidoarjo itu, Mimik Idayana mempertanyakan spesifikasi pekerjaan yang seharusnya memiliki ketebalan tertentu sebelum dan sesudah pemadatan. Selain itu, menyampaikan ketebalan lapisan aspal sudah memenuhi standar.



Kamis, 09 Apr 2026 00:09 WIB

**Diduga Terjatuh Saat Bermain Sendirian, Balita 2 Tahun Hilang Tenggelam di Sungai Kalidawir Tanggulangin**

"Ketebalan aspal jalan ini, telah sesuai standar yaitu mulai dari 3 sentimeter dan lapisan aspal sesuai menggunakan batu giral, lapen dan aspal hot mix. Kami mengingatkan agar kualitasnya tidak sampai kurang karena akan berdampak pada daya tahan jalan," ujar Mimik Idayana.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Cari Berita

HOME METROPOLIS POLITIK EKDIS HUKRIM PERISTIWA ADVERTORIAL PROFILE KULINER GAYA HIDUP PEMERIN

ai Dukung - Mendukung di Muscab PKB Sidoarjo, Dua Ketua PAC Jadi Sorotan Publik ■ Empat Loyalis Diusulkan, Sekjen : PKB Cari



Selain itu, Mimik mengingatkan pengguna jalan agar kendaraannya yang melintas disesuaikan dengan kelas jalan dan tonasenya. Selain kualitas aspal, Mimik Idayana juga menyoroti sistem drainase yang dinilai tidak berfungsi optimal.

"Karena saya menemukan sejumlah saluran air yang tertutup urukan dan pengecoran tanpa mempertimbangkan aliran air," ungkapnya.

Mantan anggota DPRD Sidoarjo periode 2019 - 2024 ini menyampaikan jika saluran air tertutup seperti itu, maka air tidak memiliki jalur aliran. Hal itu, dapat menyebabkan banjir.



Rabu, 08 Apr 2026 20:30 WIB

**Kecewa Saat Sidak TPST Penatarsewu dan Terungkulon, Bupati Minta Benahi Seluruh Pengelolaan Sampah di Sidoarjo**

"Kami meminta pemerintah desa dan pihak terkait untuk lebih serius dalam merencanakan pembangunan infrastruktur. Khususnya, soal sistem drainase dan pembangunan jalan harus terintegrasi dengan perencanaan saluran air agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegasnya.



Tidak hanya itu, Mimik juga menegaskan agar penanganan saluran air diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini, karena pembangunan jalan tidak akan efektif jika tetap terjadi banjir. Termasuk, perencanaan harus jelas mencakup arah aliran air, panjang saluran dan titik akhirnya.

"Kami mengingatkan agar masyarakat tidak menutup saluran air secara sembarangan. Karena hal itu, memperparah kondisi banjir serta pembangunan tetap diperbolehkan selama dilengkapi dengan bak kontrol agar perawatan saluran tetap mudah dikerjakan," tandasnya.



Rabu, 08 Apr 2026 17:57 WIB

**Dua Ulir Pintu Ari Hilang 4 Tahun Terakhir Diketahui Saat Wabup Sidoarjo Sidak Normalisasi Sungai Porong**



Tidak hanya itu, Mimik juga menegaskan agar penanganan saluran air diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini, karena pembangunan jalan tidak akan efektif jika tetap terjadi banjir. Termasuk, perencanaan harus jelas mencakup arah aliran air, panjang saluran dan titik akhirnya.

"Kami mengingatkan agar masyarakat tidak menutup saluran air secara sembarangan. Karena hal itu, memperparah kondisi banjir serta pembangunan tetap diperbolehkan selama dilengkapi dengan bak kontrol agar perawatan saluran tetap mudah dikerjakan," tandasnya.



Rabu, 08 Apr 2026 17:57 WIB

**Dua Ulir Pintu Ari Hilang 4 Tahun Terakhir Diketahui Saat Wabup Sidoarjo Sidak Normalisasi Sungai Porong**



Selain itu, Mimik Idayana juga meminta evaluasi terhadap ketinggian jalan. Hal itu, harus dengan perhitungan matang agar tidak berdampak pada rumah warga di sekitarnya. Sidak ini, menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memastikan kualitas pembangunan infrastruktur.

"Termasuk, sekaligus mengatasi persoalan banjir. Kami berharap melalui perencanaan yang terintegrasi dan pengawasan yang ketat, maka pembangunan jalan ke depan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," pungkasnya. Ary/Waw

**Editor : Redaksi**